

Orang Malind dan Tanahnya: Membaca Kebijakan *Food Estate* Melalui Paradigma Ethnoecology dan Ethnodevelopment

Malind People and Their Land: Reading Food Estate Policy through Ethnoecology and Ethnodevelopment Paradigms

Dwi Wulan Pujiriyani

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis praktik pengadaan lahan pangan skala luas dalam skema MIFEE di Merauke Papua sebagaimana didokumentasikan dalam film *Mama Malind Su Hilang*'. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Praktik pengadaan lahan dan keterpinggiran masyarakat lokal dianalisis dengan menggunakan dua paradigma utama yaitu paradigma etnoekologi dan paradigma etnodevelopment. Kedua paradigma ini digunakan sebagai kerangka analisis karena memiliki benang merah dalam perspektif yang dibangunnya berkaitan dengan relasi antara manusia dengan alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa food estate merupakan realitas pengabaian terhadap konsep hutan yang dimaknai sebagai sumber kehidupan. *Food estate* juga merupakan contoh pembangunan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat lokal serta pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai lokal terkait personifikasi hutan yang bukan semata sebagai aset, tetapi sebagai penopang daya hidup bagi masyarakat lokal melalui nilai-nilai non ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan lahan pangan skala luas perlu dievaluasi ulang apabila akan dilanjutkan atau diterapkan. Kehilangan tanah bagi masyarakat Zanegi tidak hanya menandai hilangnya sumber penghidupan tetapi juga identitas sebagai komunitas yang memiliki daya hidup dan kemandiriannya sendiri.

Kata Kunci: pengadaan tanah, lumbung pangan, MIFEE, etnoekologi, etnodevelopment, ekofeminisme

Abstract

*This paper aims to analyze the practice of large-scale land acquisition under the MIFEE scheme in Merauke Papua as documented in the film *Mama Malind Su Hilang* '. The method used is descriptive qualitative using content analysis. The practice of land acquisition and the marginalization of local communities were analyzed using two main paradigms, namely the ethnoecological paradigm and the ethnodevelopment paradigm. These two paradigms are used as an analytical framework because they have a common thread in the perspective they build regarding the relationship between humans and nature. The results showed that food estate is the reality of ignoring the concept of forest which is interpreted as a source of life. Food estate is also an example of development that is insensitive to the needs of local communities as well as development that ignores local values related to forest personification which are not only as assets, but as a life support for local communities through their non-economic values. This indicates that the policy for large-scale food land acquisition needs to be re-evaluated if it is to be continued or implemented. The loss of land for the Zanegi people not only marks the loss of their source of livelihood but also an identity as a community that has its own life force and independence.*

Kata Kunci: *land acquisition, food estate, MIFEE, ethnoecology, ethnodevelopment*

How to Cite: Pujiriyani, D.W. (2023). Orang Malind dan Tanahnya: Membaca Kebijakan Food Estate Melalui Paradigma Etnoekologi dan Etnodevelopment. ***Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*** 8 (2): 135-147.

*Corresponding author:

E-mail: luciawulan@gmail.com

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Food estate (lambung pangan) merupakan istilah populer untuk menyebut budidaya tanaman skala luas (>25ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), modal serta organisasi dan manajemen modern (Nasution dan Bangun, 2020). Food estate menjadi salah satu pilihan kebijakan pemerintah Indonesia untuk menjaga ketersediaan pangan. Pada tahun 2021, program ini dilaksanakan melalui pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Papua (Merauke). Program pengembangan food estate bukan pertama kali dilakukan di Indonesia. Pada era pemerintahan Soeharto pernah dilakukan pengembangan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Sementara itu pada era SBY pernah dilakukan program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Dalam perjalanannya, isu sosial mewarnai implementasi kebijakan food estate atau lambung pangan ini, diantaranya adalah sejarah konflik tenurial yang panjang termasuk di dalamnya klaim-klaim lahan dan status kepemilikan masih belum terselesaikan. Salah satu catatan penting dari program

ini adalah timbulnya konflik agraria karena lahan yang dibuka merupakan tanah adat yang sakral. Salah satu hal penting yang terjadi adalah alih fungsi lahan hutan yang menyebabkan masyarakat yang bergantung pada hutan harus kehilangan sumber pangannya (Anonim, 2020).

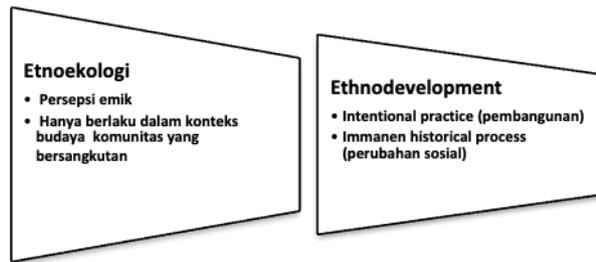
Salah satu contoh persoalan yang muncul dalam implementasi kebijakan food estate adalah persinggungan dengan penduduk lokal atau masyarakat asli sebagaimana yang muncul dalam kisah orang Malind di Kampung Zanegi, Merauke, Papua. Sebagaimana dijelaskan dalam Takeshi et all (2014), Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) merupakan ruang strategis dimana terdapat perusahaan yang difasilitasi negara dalam memulai suatu jalur akumulasi kapital baru demi menyelamatkan dunia dari krisis pangan dan energi. Desain besar dari proyek ini adalah mengakselerasi proses pembangunan. Muncullah kasus 'berpindah'nya tanah orang Malind kepada Medco. Ditambahkan dalam Zakaria (2011), bahwa Medco merupakan salah satu grup usaha besar yang berpusat di Jakarta yang telah menanamkan modalnya melalui anak perusahaan PT Selaras Inti Semesta (SIS) untuk membangun Hutan Tanaman

Industri (HTI) pada areal seluas 300.000 hektar ha) di wilayah Distrik Kurik, Distrik kaptel, Distrik Animba dan Distrik Muting dan melalui anak perusahaan PT. Medco Papua Industri Lestari (MIL) untuk memproduksi kayu serpih dan bubur kertas atau *pulp*. 'Mama Malind su Hilang' menjadi sebuah elegi bagi masyarakat Zanegi mengenai kehidupan masa depan yang entah bagaimana dapat dilalui oleh generasi muda anak cucu mereka di kemudian hari.

Kehidupan orang Malind di Kampung Zanegi berubah pasca masuknya Medco yang merampas tanah-tanah milik masyarakat. Medco membabat ribuan hektar hutan di Kecamatan Animha dan Kaptel di Kabupaten Merauke. Medco berencana mengkonversi 169.000 hektar tanah untuk menjadi perkebunan HTI akasia dan eucaliptus. Medco bersama mitranya LG, mengeksport chips dan pellet untuk Korea Selatan, Jepang dan beberapa negara lainnya. Konsesi ini merupakan bagian dari pengembangan MIFEE, sebuah proyek kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha yang akan membuka jutaan lahan dan hutan untuk solusi krisis pangan dan energi dunia.

Kondisi yang sedang dialami orang Malind di Kampung Zanegi menjadi potret yang menarik untuk dianalisis

secara khusus dengan menggunakan paradigma etnoekologi dan *ethnodevelopment*. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan lokal terhadap perubahan lanskap dan kondisi sumberdaya agraria yang berakibat pada perubahan sumber penghidupan komunitas asli. Kedua paradigma ini memiliki benang merah dalam perspektif yang dibangunnya berkaitan dengan relasi antara manusia dengan alam. *Prefix* atau awalan 'etno' pada paradigma 'etnoekologi' dan '*ethnodevelopment*', sebagaimana disebutkan Milton (1997), menyatakan suatu bidang pengetahuan yang didefinisikan dari sudut pandang tinjauan dan bukan dari sudut pandang si peneliti (analisis). Istilah 'etno' seringkali juga dilekatkan dengan istilah '*folk*'. Persepsi atau sudut pandang 'emik' menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks etnoekologi. Sementara itu dalam *ethnodevelopment*, konsep 'pembangunan' (*intentional process*) dan 'perubahan sosial' (*immanent historical process*) merupakan dua kunci yang harus dipahami. *Ethnodevelopment* menjadi respon dari *ethnic unfreedom* atau ketidakbebasan kelompok etnik akibat model kemajuan yang patriarki (singular/menyeragamkan).



Gambar 1. Paradigma Etnoekologi dan Ethnodevelopment

Berangkat dari definisi mengenai 'etnoekologi', Kottak (1999) menyebutkan bahwa *"An ethnoecology is any society's traditional set of environmental perceptions that is, its cultural model of the environment and its relation to people and society"*, etnoekologi merupakan 'bangunan persepsi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat tradisional, persepsi ini merupakan model kultural dari lingkungan dan relasinya dengan masyarakat'. Sementara itu Ruiz-Malle (2012), menambahkan bahwa etnoekologi mengkaji relasi manusia dengan lingkungannya yang bertujuan untuk memahami berbagai persoalan sosial ekologis seperti degradasi lingkungan dan hilangnya keragaman kultural, melalui sudut pandang masyarakat lokal. Etnoekologi mengeksplorasi cara-cara dimana kelompok yang masyarakat yang berbeda menerima dan merepresentasikan sistem ekologisnya melalui pengetahuan, kepercayaan dan praktiknya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Milton (1997), etnoekologi berakar dari ketertarikan pada upaya untuk memahami seseorang dari persepsi mereka sendiri dan interpretasi mereka mengenai dunia dalam berbagai keragaman budaya. Dalam hal inilah para antropolog yang mengikuti rute ini akan tertarik pada apa yang menyebabkan seseorang melakukan suatu kegiatan (tujuan, motivasi, asumsi, dan kepercayaan) serta konsekuensi sosial dan budaya dari perilaku daripada dampak-dampak ekologisnya. Fokus terhadap konsep seseorang mengenai dunianya inilah yang kemudian dikenal dengan 'antropologi kognitif' yang mencakup beberapa subbidang seperti etnobiologi, etnomedisin, etnobotani dan etnoekologi. Oleh karena itulah, jika 'ekologi' merupakan sebuah disiplin ilmiah yang asumsi dan temuannya dianggap dapat diterapkan secara universal, maka 'etnoekologi' merupakan pengetahuan mengenai lingkungan yang dimiliki dalam sebuah tradisi kultural yang spesifik dan hanya berlaku dalam konteks tradisi tersebut. Dalam studi etnoekologi, pertanyaan yang terpenting adalah bagaimana relasi antara alam dan budaya dalam pikiran masyarakat yang kita kaji? Konsep-konsep ini seringkali hadir dalam pikiran seseorang begitu saja. Dalam tradisi inilah muncul asumsi mengenai

oposisi biner (*nature/culture, female/male, night/day*) sebagai pemikiran manusia yang universal.

Etnoekologi bertumpu dan berawal pada kemampuan setiap kelompok etnik dalam memilah, memilih dan membaca keunikan alam untuk memproduksi pemenuhan kebutuhan dasar serta kelangsungan kelompoknya yang bertumpu pada azas keterkaitan di antara realitas alam. Etnoekologi juga berkaitan dengan kemampuan memproduksi kebutuhan dengan mencermati saling hubungan peristiwa alam dan kaidah-kaidahnya. Etnoekologi mempelajari integrasi antara pengetahuan, perilaku masyarakat berinteraksi dengan alam lingkungannya. Etnoekologi menelaah cara-cara masyarakat tradisional memakai ekologi dan hidup selaras dengan lingkungan alam dan sosialnya. Kehidupan masyarakat tradisional pada umumnya amat dekat dengan alam dan manusia mengamati alam dengan baik, mengenal karakteristiknya, sehingga mereka tahu bagaimana menanggapi.

Sementara itu, mengacu pada Chernela (2011), terminologi '*ethno-development*' merupakan terminologi yang relatif baru. Istilah ini dimunculkan pertama kali oleh Rohini Talalla pada tahun 1980 dalam monografinya yang bertajuk '*Ethnodevelopment and the Orang*

Asli of Malaysia'. Dua tahun setelahnya, terminologi ini dimasukkan dalam wacana pembangunan dalam konferensi UNESCO di Afrika dimana penggunaannya mengacu pada remediasi kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah yang mengancam identitas etnik. Istilah '*ethnodevelopment*' digunakan sebagai upaya untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi rasial dan etnosida.

Konteks etnosida dalam konsep pembangunan konvensional banyak terjadi karena pemerintah seringkali tidak mengakui keberadaan penduduk asli atau kelompok etnik minoritas. Sebagaimana dicatat Clarke (2001) di berbagai kepulauan di Asia Tenggara, banyak kelompok etnik minoritas yang dilihat sebagai 'orang asing' (*foreigners*) oleh pemerintah dan kelompok masyarakat yang dominan terutama ketika mereka terusir dari wilayah tempat tinggal mereka dalam upaya untuk mempertahankan identitas mereka. Di berbagai wilayah di Asia Tenggara seperti Vietnam, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, kelompok etnik minoritas dan penduduk asli terkena dampak negatif dari pembangunan sejak akhir Perang Dunia ke-2 dan perjuangan memperoleh kemerdekaan di berbagai negara. Selama hampir 3 dekade, etnik minoritas dan penduduk asli termarginalisasikan dari

berbagai manfaat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang mengatasnamakan kesejahteraan sosial.

Konsep '*ethnodevelopment*' seperti halnya '*selfdevelopment*' dan '*development with identity*' menjadi bagian dari perspektif baru yang darinya diupayakan sebuah pemikiran baru dari konsep pembangunan konvensional. Terminologi '*ethnodevelopment*' mengacu pada kebijakan dan proses pembangunan yang sensitif terhadap kebutuhan kelompok etnik minoritas dan penduduk asli dan memungkinkan mereka untuk ikut serta terlibat di dalamnya. *Ethnodevelopment* menjadi semacam *counter* terhadap etnosida dengan memungkinkan kelompok etnik minoritas untuk memulihkan nilai-nilai yang mendasari kekhususan budaya mereka dengan menggunakan perspektif mereka untuk menguatkan kemampuan mereka bertahan dari berbagai bentuk eksploitasi dan penindasan serta secara khusus kemampuan mereka untuk bisa mengambil keputusan secara mandiri melalui kontrol politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berdampak pada pembangunan versi mereka, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang ditujukan bagi kelompok etnik harus mematuhi aturan ini, harus memastikan bahwa seluruh

kelompok etnik akan menikmati kebebasan untuk bisa hidup dengan cara hidup mereka yang spesifik. Terminologi *ethnodevelopment* mengacu pada kebijakan dan proses pembangunan yang sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan kelompok etnik minoritas dan penduduk asli. Kebijakan *ethnodevelopment* memberikan mandat bahwa kelompok etnik yang termarginalkan harus diberikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan yang berdampak pada komunitas mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis isi. Sumberdata yang dianalisis untuk penelitian ini adalah film dokumenter berjudul *Mama Malind Su Hilang* atau *Our Land is Gone* yang diproduksi oleh Yayasan Pusaka, SKP Same dan Gekko Studio. Metode analisis isi dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap visualisasi dan teks yang dihadirkan di dalam film *Mama Malind Su Hilang*. Analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kategori analisis isi kualitatif atau disebut juga analisis wacana. Analisis wacana dilakukan melalui pemaknaan teks yang muncul dalam komunikasi subjek (orang malind) yang terekam di dalam film dokumenter

untuk selanjutnya mefokuskan pada pesan yang bersifat latent (tersembunyi) yang ada di balik teks tersebut. Teks yang berupa tuturan orang malind diperlakukan sebagai perspektif emik atau persepsi orang Malind dalam memaknai ekspansi lahan yang pertanian pangan skala luas yang sedang terjadi di Kampung Zanegi. Teks dan visualisasi inilah yang kemudian dibaca melalui kerangka etnoekologi dan etnodevelopment.

HASIL DAN PEMBAHASAN

“Hutan yang Memberi Kami Makan:” Membaca Realitas Malind dalam Paradigma Etnoekologi

Etnoekologi Malind dapat dibaca melalui cara mereka menempatkan ‘hutan’ sebagai ekosistem atau ruang hidup yang sangat penting bagi kesehariannya. Hutan bagi orang Malind adalah tempat mereka dilahirkan, tempat untuk mendapat makan, tempat untuk mendapat jaminan. Segala yang dibutuhkan orang Malind dalam kesehariannya didapatkan dari hutan baik untuk makan maupun minum. Hutan menyediakan sagu, daging dan kelapa. Hutan memberikan ketentraman dan kenyamanan hidup bagi orang Malind seperti dapat dicermati dalam kutipan berikut ini:

“Kita dilahirkan, dibesarkan, dapat makan dapat jaminan itu dari hutan. Jadi kita makan dan minum hampir setiap hari, setiap saat di atas tanah hutan ini. Jadi

dari dulu kami hidup itu hanya dengan sagu, daging, kelapa, pisang. Dari kakek nenek moyang sampai sekarang itu masih (Amanduz Gebze, masyarakat Kampung Zanegi, 2012).

Pemahaman terhadap hutan sebagai sumber kehidupan terefleksi dari cara orang Malind membayangkan masa depan ketika tidak ada lagi hutan yang mampu memberikan apa yang mereka butuhkan. Ketiadaan hutan dimaknai sebagai sebuah kesengsaraan yang harus ditanggung tidak hanya oleh orang Malind sekarang ini, tetapi juga oleh anak cucu mereka di masa depan.

“Hidup dulu itu masih hidup senang, karena alam itu masih limpah. Jadi hidupnya itu tidak susah karena hutan masih antero, tidak ada gangguan. Hati nenek sekarang sedih, memikirkan anak cucu, anak-anak kita. Berpikir hidup dulu dengan sekarang tidak sama. Kasihan nanti anak cucu kita nanti, hancur. Memang tidak bisa hidup senang. Nenek punya hati terpukul sekarang. Aduh anak cucu kita nanti mau gimana” (Cornelia Balagaize, masyarakat Kampung Zanegi, 2012)

Hutan bagi orang Malind bukan semata limpahan kayu yang bisa dengan mudah ditebang untuk digantikan dengan perkebunan. Bagi orang Malind, hutan adalah sumber kehidupan. Hutan adalah tempat hidup rusa yang menjadi sumber daging bagi mereka. Hutan juga menjadi lumbung pangan karena disanalah tumbuh pohon-pohon sagu yang senantiasa dapat diandalkan sebagai sumber pangan.

Penebangan hutan yang telah merusak dusun sagu menjadi malapetaka bagi masyarakat Zanegi. Dusun sagu atau lumbung pangan orang Malind yang seharusnya di-*enclave* dengan jarak 1500 meter dari aktivitas perusahaan, tidak ditepati.

'Di belakang saya ini adalah dusun sagu. Lumbung makanan kita orang di sini. Ketika adanya perusahaan, mereka berjanji, setiap dusun sagu, perusahaan akan *enclave* dengan jarak 1500 meter, lewat sosialisasi waktu itu. Datang penebangan jadilah itu. Pohon sagu ditimpa pohon yang ditebang.' (Arnold Basikbasik, Sekretaris Kampung Zanegi, 2012)

Pohon-pohon sagu rusak terkena penebangan kayu. "*Kalau sagu habis, berarti manusia habis*", merupakan sebuah kutipan yang merefleksikan bahwa sagu adalah bagian dari sediaan alam yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Zanegi. Hilangnya sagu berarti hilangnya kehidupan masyarakat Zanegi.

'Kita mau cari makan sagu, semua dapat dari hutan. Kita masuk dapat daging, di dalam hutan. Kita dulu itu waktu belum ada perusahaan, kita cari daging satu jam sudah dapat, kita bawa pulang. Itu perbedaan salah satu contoh nyata. Sekarang setelah ada perusahaan, cari rusa satu ekor saja satu hari belum tentu dapat, dua hari baru mungkin dapat satu ekor, itu perbedaannya.' (Moses Kaize, Dewan Stasi Kampung Zanegi, 2012).

Hutan yang rusak, rusa yang tidak lagi mudah dijumpai serta pohon-pohon sagu yang tidak lagi bisa diandalkan

sebagai lumbung pangan sehari-hari adalah beberapa kepahitan yang kini ada di depan mereka. Suku Malind Anim sebagai masyarakat peramu yang mengandalkan hutan sebagai sumber hidup utama harus mengalami kenyataan berubahnya ruang hidup secara drastis. 'Dulu' dan 'sekarang' adalah periode waktu yang digunakan orang Malind di Kampung Zanegi untuk membandingkan kenyamanan hidup yang tidak bisa dirasakan saat ini.

'Waktu mulai masuk bertani, bahasa yang diungkapkan pada saat itu, pada awal itu terlalu tinggi. Hebat betul lah. waktu sosialisasi bicara lain, waktu pelaksanaan lain. Datang pembabatan, aturan dia buat, semua hilang, burung kuning dia punya tempat, sagu sudah tidak ada tempat, dusun juga pembersihan. tanah kerabat juga sudah tidak ada'. (Linus Gebze, Ketua adat Kampung Zanegi, 2012).

'Bukan Kita yang Untung Tapi Perusahaan yang Untung': Membaca Realitas orang Malind dalam Paradigma *Ethnodevelopment*

Kebijakan Merauke Integrated Food and Energy Estate yang dilaksanakan di wilayah hidup orang Malind di Kampung Zanegi adalah wujud nyata dari paradigma pembangunan konvensional yang akan berujung pada etnosida. Solusi untuk ketahanan pangan dan energi dunia, bukanlah sebuah konsep pembangunan yang dipahami oleh orang Malind. Pengusahaan HTI yang dilakukan Medco

sama sekali tidak sensitif pada kebutuhan orang Malind sebagai masyarakat peramu yang sangat bergantung pada hutan.

Jadi perusahaan itu datang bukan mau bina kita, tapi datang merusakkan kita dan merampas kita punya hak-hak. Dia mulai injak kita. Bagaimana dia mau mempertahankan tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain. Apa daya dia?. Kerugian ini bukan sedikit. Perusahaan masuk itu bawa visi misi bagus sekali. Orang yang dengar itu senang. Ternyata di belakang itu tipu. Sampai orang dari kampung belakang, tetangga-tetangga mau datang bekerja, tahu-tahu di samping itu dia singkirkan dengan alasan yang tidak jelas. Sampai sekarang saya masih tuntutan itu perusahaan janji sama kita, dia hanya bohong saja, hanya sistem rayu saja (Yoseph Emanuel Ndiken, Buruh harian lepas Medco, 2012).

Prinsip *ethnodevelopment* dimana masyarakat seharusnya diberi hak untuk mengetahui dan ikut menentukan pembangunan yang dilakukan di wilayahnya, sama sekali tidak terjadi. 'Pembangunan kampung' yang diharapkan orang Malind diantaranya melalui kesempatan untuk bekerja di perusahaan yang masuk ke wilayah mereka, hanya menyisakan tipu muslihat yang menyengsarakan. Prinsip *free, prior, informed* dan *consent*, tidak dilaksanakan oleh agen pembangunan yang masuk baik pemerintah maupun perusahaan.

'Kalau di sini khususnya Medco, kalau buat Medco pertama itu dia sistem jajah. Jadi kalau masyarakat tuntutan. Dia main pegang aparat. Jadi aparat yang amankan. Dia main ancam masyarakat dengan aparat. Kayu dia orang tebang. Waktu

penebangan pas pelebaran jalan. Saya tegur itu, kasian orang yang punya, nanti tertutup tanah itu. Saya dipukul, saya ditembak pu di celah kaki. Padahal saya kerja di perusahaan, tapi saya tidak suka perusahaan cara kerja begitu. Perusahaan dia sistemnya mau injak-injak masyarakat yang punya hak di sini. Masyarakat yang punya hak mau tuntutan, ada aparat. Masyarakat takut sama aparat'. (Yoseph Emanuel Diken, Buruh Harian lepas Medco, 2012)

Orang Malind di Kampung Zanegi tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah mereka. Kebutuhan mereka sama sekali tidak diperhatikan. Masyarakat kehilangan segala-galanya, baik tanah, hutan maupun masa depannya. Dalam konteks *ethnodevelopment*, seharusnya dipahami kebutuhan masyarakat atau kelompok etnik dimana proses intervensi pembangunan itu akan dilakukan. Jika mandat *ethnodevelopment* dilaksanakan, seharusnya dipahami bahwa orang malind di Kampung Zanegi adalah masyarakat peramu yang sudah mengalami keterasingan dari berbagai perkembangan yang sudah dan sedang terjadi. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah kelestarian hutan dan pengembangan kemampuan diri baik melalui sekolah, jaringan kerja yang baik dan teratur maupun pergaulan yang luas. Dalam konteks inilah keberpihakan yang berkeadilan diperlukan.

Pada orang Malind yang terjadi adalah sebaliknya, kebebasan mereka terampas. Penindasan terjadi melalui penyingkiran masyarakat dari proses pembangunan yang sedang berjalan. Hak orang Malind untuk hidup di wilayah tempat tinggalnya, justru dirampas dengan pengambilan tanah-tanah mereka dengan tipu daya dan dukungan personel militer. Sebuah proses penjajahan dan etnosida orang Malind yang mengatasnamakan pembangunan.

Kehidupan telah berubah dengan masuknya perusahaan (Medco) yang memabat ribuan hektar hutan di wilayah mereka. Medco ingkar terhadap visi misi mereka yang diawal dipercaya akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat Kampung Zanegi. Orang Malind di Kampung Zanegi yang sudah dijanjikan untuk bekerja di perusahaan, pada kenyataannya hanya dijadikan buruh harian lepas. Hanya sedikit orang Malind di Kampung Zanegi yang bekerja di perusahaan. Sebagian besar pekerja di perusahaan berasal dari wilayah di luar Kampung Zanegi. Orang Malind di Kampung Zanegi disingkirkan karena perusahaan hanya membutuhkan tanah, tidak membutuhkan masyarakat. Etnosida sedang membayangi orang Malind di Kampung Zanegi dengan pasti seperti terekam berikut ini:

Bayi-bayi mengalami gizi buruk dan sering sakit-sakitan. Dalam satu tahun, bisa terdapat 12 anak yang mengalami gizi buruk. Mengacu pada laporan PBB tentang hak atas tanah, konversi 1-2 juta hektar hutan juta hutan hujan tropis dan pertanian skala kecil menjadi perkebunan berorientasi ekspor dan bahan bakar agro di wilayah Merauke akan berdampak buruk pada keamanan pangan 50.000 orang (Hendrika Lawalata, Bidang kampung Zanegi)

Masyarakat Kampung Zanegi dilekatkan sebagai 'pengganggu' yang harus disingkirkan. Kesengsaraan besar bagi para pemilik tanah tidak bisa dihindarkan. Tertipu dengan janji-janji manis adalah bagian dari sebuah kenyataan yang tidak mungkin dikembalikan hanya melalui sebuah penyesalan. Perusahaan dengan perlindungan militer, melakukan proyek pembangunan dengan sewenang-wenang. Konflik yang terjadi dengan masyarakat tidak pernah diupayakan dengan mediasi yang berimbang. Masyarakat takut kepada perusahaan yang dilindungi oleh personel militer.

SIMPULAN

Tragedi 'berkat' pembawa kesengsaraan yang terekam dalam elegi orang Malind di Kampung Zanegi merupakan sebuah realitas yang menunjukkan bahwa harmonisasi relasi antara manusia dengan alam yang telah terbangun sekian lama dalam sebuah sistem ekologis masyarakat peramu sagu

di Merauke, seketika menjadi petaka karena kehadiran perusahaan ekstraktif yang menjadi bagian dari skema besar kebijakan mengatasi krisis pangan dan energi dunia. Situasi ini menjadi catatan penting ke depan, jika memang harus diimplementasikan, kebijakan pengadaan tanah skala luas untuk lumbung pangan harus dilakukan dengan hati-hati. MIFEE menunjukkan betapa kebijakan food estate sangat rentan menimbulkan dampak buruk pada komunitas lokal atau masyarakat asli. Akan menjadi tidak adil jika lumbung pangan yang ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan pada akhirnya justru merusak keswadayaan komunitas lokal yang sudah dibangun sekian lama.

Paradigma etnoekologi membaca realitas orang Malind di Kampung Zanegi sebagai sebuah pengabaian terhadap konsep 'hutan' yang dimaknai sebagai sumber kehidupan. Hutan adalah tempat hidup rusa yang menjadi sumber daging bagi mereka dan tempat tumbuh pohon-pohon sagu yang menjadi sumber pangan mereka. Penebangan hutan menjadi malapetaka bagi orang Malind di Kampung Zanegi karena menandakan hilangnya kehidupan orang Malind di Kampung Zanegi.

Paradigma *ethnodevelopment* membaca realitas orang Malind di Kampung Zanegi sebagai sebuah etnosida

karena pembangunan yang dijalankan tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi justru eksploitatif dan menindas. Orang Malind di Kampung Zanegi tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah mereka. Kebutuhan mereka sama sekali tidak diperhatikan. Jika mandat *ethnodevelopment* dilaksanakan, seharusnya dipahami bahwa orang Malind di Kampung Zanegi adalah masyarakat peramu yang sudah mengalami keterasingan dari berbagai perkembangan yang sudah dan sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2021. Food Estate Kalimantan Tengah Kebijakan Instan Sarat Kontroversi. www.pantaugambut.id. Diakses 30 Januari 2021.
- Brianson, Alex. 2016. "Europa and Gaia: Towards an Ecofeminist Perspective in Integration Theory". *Journal of Common Market Studies*, Vol.54, Number 1, pp. 121-135. DOI: 10.1111/jcms.12323.
- Briggs, John. "Indigenous Knowledge: A False Dawn for Development Theory and Practice?". *Progress in Development Studies*, Vol 13, Number 3, pp. 231-243.
- Chernela, Janet M. 2011. "Indigenous Rights and Ethno-Development: The Life of Indigenous Organization in the Rio Negro of Brazil". *Tipiti: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America*. Vol. 9, Issue.2. Article 5, pp 92-120.
- Clarcke, Gerard. 2001. "From Ethnocide to Ethnodevelopment? Ethnic Minorities and Indigenous Peoples in Southeast Asia." *Third World Quarterly*, Vol. 22, No. 3, pp 413-436.
- Kottak, Conrad. 1999. "The New Ecological Anthropology". *American Anthropologist*, Vol 101, Number.1, pp 23-35. <http://www.jstor.org/stable/683339>.
- Milton, Kay. 1997."Ecologies: Anthropology, Culture and the Environment". *International*

Social Science Journal, Vol 49, Issue 154, pp 477-495.

- Nasution, M., Bangun OV. 2020. Tantangan Program Food Estate dalam Menjaga Ketahanan Pangan. *Buletin APBN*, V(16), 7-10.
- Phillips, Mary. 2014. "Rewriting Corporate Environmentalism: Ecofeminism, Corporeality and the Language of Feeling". *Gender, Work and Organization*, Vol 21, Number 5 September. DOI: 10.1111/gwao.12407.
- Ruiz-Mallen, Isabel, et all. 2012. "Applied Research in Ethnoecology: Fieldwork Experiences". *Revista de Antropologia Iberoamericana*. Vol 7, Number 1, pp. 9-30. DOI: 10.11156/aibr.070102e.
- Takeshi, Ito; Noer Fauzi Rachman; & Laksmi A. Savitri. 2014. "Power to makeland dispossession acceptable: a policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia," *The Journal of Peasant Studies*, Vol 41, Issue 1, pp. 29-50, DOI:10.1080/03066150.2013.873029.
- Zakaria, Yando dkk. 2011. *MIFEE Tak Terjangkau Angan Malind. Catatan Atas Upaya Percepatan Pembangunan MIFEE di Kabupaten Merauke, Papua*. Jakarta: Yayasan Pusaka.